

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan daerah menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional sehingga setiap daerah diwajibkan menyukseskan pembangunan daerah. Salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah ketersediaan anggaran daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting. PAD menunjukkan seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Dalam rangka upaya peningkatan pendapatan asli daerah, setiap daerah harus mampu menggali potensi sumber dana yang ada di daerahnya sehingga daerah mampu melaksanakan otonomi daerahnya dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Undang-undang no 12 tahun 2008, menjelaskan bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus di hadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama kabupaten dan kota sebagai unit pelaksana otonomi daerah. Untuk melaksanakan otonomi daerah pemerintah harus cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensi sebagai motor penggerak pembangunan daerah terutama melalui upaya pembangunan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Mahmudi (2010:16), menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantara-Nya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Sesuai undang-undang no 34 tahun 2000 atas perubahan undang undang no 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas , nyata dan bertanggung jawab . Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu di tingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat terwujud .

Kota Yogyakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian . Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu tolak ukur pelaksanaan

otonomi daerah. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik,2013). Hal itu membuat pemerintah kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya agar dapat meningkatkan penerimaan PAD dari segala sektor.

Pada tahun 2015, kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah sebesar 5,45 persen berasal dari pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ini erat kaitannya dengan jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat

Tabel 1.1
Perkembangan Pajak Daerah, Inflasi, Jumlah Penduduk, PDRB dan Jumlah Industri Kota Yogyakarta tahun 2001-2015

Tahun	Pajak Daerah (juta rupiah)	Inflasi (%)	Jumlah Penduduk (orang)	PDRB (juta rupiah)	Jumlah Industri (unit)
2001	2.288.637	12,56	404.741	3.648.631	5.788
2002	3.051.759	12,01	412.196	3.812.425	5.813
2003	3.352.651	5,73	392.239	3.922.390	5.785
2004	4.058.198	6,95	398.004	3.980.040	5.814
2005	4.610.672	14,98	435.236	4.399.902	5.854
2006	4.399.715	10,4	443.112	4.574.051	5.848
2007	5.478.320	7,99	451.118	4.776.401	5.862
2008	6.245.277	9,88	456.915	5.021.148	5.950
2009	7.185.254	2,93	462.752	5.224.851	6.224
2010	7.825.458	7,38	387.086	5.505.942	6.535
2011	12.045.752	3,38	390.554	5.816.568	6.565
2012	20.832.921	4,31	394.012	6.151.679	6.565
2013	22.774.885	6,81	402.679	6.498.900	6.516
2014	25.399.630	1,76	400.467	6.640.393	5.133
2015	30.406.767	0,96	412.704	6.983.870	5.409

Sumber: BPS (berbagai edisi)

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak daerah setiap tahunnya meningkat. Besarnya penerimaan pajak daerah ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah Inflasi, Jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah industri besar dan sedang yang ada di Kota Yogyakarta. Keempat

faktor tersebut selalu berfluktuasi tiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai peramalan penerimaan pajak daerah.

Sebagai indikator perekonomian yang terkait dengan kondisi pasar, nilai inflasi berfluktuasi dengan pengaruh dari berbagai faktor seperti konsumsi masyarakat, kondisi banyaknya barang yang beredar, dan sebagainya. Inflasi merupakan rata-rata kenaikan harga barang dan jasa secara umum terus menerus dalam persen. Dengan meningkatnya inflasi maka akan menaikkan tarif pajak pada barang atau jasa. yang bersangkutan Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak, dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 392.506 jiwa sedangkan tahun 2015 naik menjadi 412.704 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk tersebut merupakan penambahan alami melalui kelahiran, maupun penambahan penduduk akibat arus migrasi. Ketika jumlah penduduk naik, maka akan semakin banyak permintaan akan barang publik sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan untuk memberikan barang-barang publik tersebut tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pungutan pajak yang bersangkutan

Jumlah penduduk yang merupakan subjek pajak adalah syarat untuk melakukan pemungutan pajak, dimana penduduk adalah yang menikmati pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 sebesar 392.506 jiwa sedangkan tahun 2015 naik menjadi 412.704 jiwa. Perkembangan jumlah penduduk tersebut merupakan penambahan alami melalui kelahiran, maupun penambahan penduduk akibat arus migrasi. Ketika jumlah penduduk naik, maka akan semakin banyak permintaan akan barang publik sehingga pemerintah akan terus mengoptimalkan untuk

memberikan barang-barang publik tersebut tetapi dengan jasa timbal balik dari masyarakat yang berupa pungutan pajak yang bersifat memaksa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dengan meningkatnya PDRB maka akan secara langsung berakibat pada kenaikan sektor-sektor pembentuk PDRB yang artinya ketika sektor-sektor itu naik, maka akan ada kenaikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?
4. Bagaimana Pengaruh jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta

2. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta
3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah Industri terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Yogyakarta

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti
 - a) Dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti tentang pajak daerah .
 - b) Dapat mengetahui faktor faktor apa saja yang menghambat dan mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - a) Agar masyarakat kota yogyakarta mempunyai kesadaran akan pentingnya kewajiban membayar pajak .
 - b) Dan dapat mengetahui dana pajak dikelola untuk meningkatkan fasilitas umum dan pelayanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta
3. Manfaat bagi pemerintah (pembuat kebijakan)
 - a) Diharapkan pemerintah Kota Yogyakarta lebih bijak dan mempertimbangkan hal-hal dalam mengambil keputusan.
 - b) Agar pemerintah lebih meningkatkan fasilitas dan layanan publik untuk masyarakat Kota Yogyakarta.